

KONFLIK ELITE POLITIK LOKAL
“Studi Kasus Pembangunan Terminal Rajekwesi
Bojonegoro”

SKRIPSI

MILIE
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA



Oleh:

Rachman Sidharta Arisandi

NIM : 070016203

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005

A B

KONFLIK ELITE POLITIK LOKAL
“Studi Kasus Pembangunan Terminal Rajekwesi
Bojonegoro”

SKRIPSI

Diajukan Guna Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Dalam Memperoleh Gelar Sarjana
Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik



Oleh:

Rachman Sidharta Arisandi
NIM : 070016203

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005

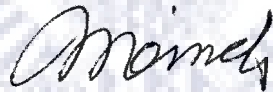
LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk diujikan.

Surabaya, 7 Februari 2005

Mengetahui,

Dosen Pembimbing Skripsi



Drs. Priyatmoko MA
NIP. 130 937 952

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini telah di uji dan dipertahankan

Di depan tim penguji pada:

Hari : Senin

Tanggal : 28 Februari 2005

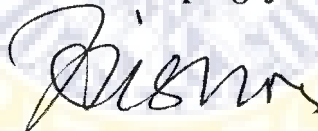
Waktu : 09.00 – 10.30 WIB

Tempat : R. 240, FISIP, Universitas Airlangga, Surabaya

Mengetahui,

Tim Penguji

Ketua tim penguji




Drs. Wisnu Pramutanto, MS
NIP. 131 453 124

Anggota I



Dra. Siti Aminah MA
NIP. 131 836 624

Anggota II



Drs. Priyatmoko MA
NIP. 130 937 952

BAB IV

PENUTUP

IV.1 Kesimpulan

Konflik terminal Rajekwesi secara garis besar dilatarbelakngi oleh dua hal, yaitu: *Pertama*, adanya indikasi terjadinya KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dalam proses pembangunan terminal, yaitu:

- a. Tidak adanya transparansi dalam penentuan tender rekanan dengan pihak swasta.
- b. Kualitas bahan bangunan fisik tidak sesuai dengan standar yang diharapkan.
- c. Penguapan anggaran sebesar Rp. 1.500.000.000 melalui posting dana pengurukan – pada pembangunan tahap I.

Kedua, adanya konflik kepentingan antara elite-elite politik lokal di Bojonegoro. Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan, permasalahan pembangunan terminal Rajekwesi muncul berdekatan dengan masa akhir jabatan bupati Atlan (\pm 1 tahun). Dalam kasus ini, bupati Atlan mempunyai maksud membangun terminal dengan tujuan untuk meraih simpati masyarakat Bojonegoro dalam rangka persiapan pencalonan kembali dirinya sebagai bupati, karena itu pembangunan terminal terkesan dipaksakan. Sedang disisi lain, terdapat elite politik lain yang berasal dari PDI-P, yang juga berkepentingan dalam pemilihan bupati Bojonegoro. PDI-P sebagai partai terbesar di Bojonegoro pada saat itu, menangkap adanya peluang untuk menggagalkan upaya Atlan melalui pengungkapan kasus pembangunan terminal Rajekwesi. Sehingga permasalahan terminal Rajekwesi tersebut berkembang menjadi konflik elite politik lokal.

Konflik tersebut terjadi antara elite-elite pemerintahan dengan elite-elite yang berada di luar pemerintahan. *governing elite* merujuk pada Atlan (Bupati Bojonegoro) dan Muchtar (Ketua Komisi D yang berasal dari PDI-P) yang secara langsung terlibat dalam proses pembangunan terminal Rajekwesi. Sedangkan *non-governing elite* merujuk pada Bambang Soen (ketua PDI-P Bojonegoro) serta Agus Susanto Rismanto (Ketua FMBB) yang *concern* terhadap permasalahan tersebut.

Konflik elite tersebut bermula ketika dalam proses pembangunan terminal Rajekwesi II ditemukan adanya *deal* politik antara Atlan dengan Muchtar untuk berpasangan menjadi calon bupati/wabup dalam pemilihan mendatang. Indikasi tersebut didukung dengan fakta berlanjutnya pembangunan terminal Rajekwesi II, meskipun mendapat banyak tentangan dari masyarakat. Kondisi yang demikian tentu saja sangat mengecewakan Bambang Soen, karena perjuangannya melalui jalur parlemen sudah tidak mungkin lagi dilakukan (karena kader PDI-P yang ada di DPRD tidak lagi berpihak dan menentang kebijakan Bambang Soen) kemudian Bambang Soen berkumpul dengan beberapa elemen masyarakat (yang kebanyakan masih merupakan orang-orang Bambang Soen) untuk kemudian membentuk FMBB dengan Agus sebagai ketuanya..

Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Agus inilah yang kemudian meneruskan upaya penyelesaian kasus pembangunan terminal Rajekwesi secara hukum dengan menuntut pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam proses pembangunan.

Permasalahan terminal Rajekwesi merupakan kasus publik terbesar yang pernah terjadi di Bojonegoro. Dengan eskalasi konflik yang cukup tajam serta respon yang besar dari masyarakat, konflik tersebut memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap

upaya berkembangnya demokratisasi di Bojonegoro. Beberapa catatan penting dalam kasus tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Meluasnya partisipasi politik masyarakat ditunjukkan oleh dua bentuk partisipasi, diantaranya adalah bentuk partisipasi politik konvensional yang ditandai dengan munculnya kelompok-kelompok kepentingan yang secara aktif berperan dalam mempengaruhi *policy making* melalui sosialisasi politik dan komunikasi politik. Sedangkan pada kondisi tertentu partisipasi tersebut dapat berupa partisipasi politik non-konvensional melalui aksi-aksi unjuk rasa.
- b. Adanya keterlibatan/partisipasi masyarakat luas, menyebabkan muncul baik secara langsung ataupun tidak langsung dalam konflik tersebut. Hal ini ditunjukkan dengan munculnya elite-elite baru yang cukup potensial – dimana elite baru ini selalu mementau perkembangan kasus tersebut – yakni Agus, hal ini karena hanya Agus yang mampu membongkar kasus terminal Rajekwesi dan secara tidak langsung memberi pendidikan politik, serta mampu merubah persepsi masyarakat Bojonegoro yang selama ini menganggap bahwa kasus korupsi yang dilakukan para pejabat tidak pernah sampai di meja hijau.
- c. Namun disisi lain, ada beberapa kelemahan dalam pelaksanaan demokratisasi di Bojonegoro tersebut, yakni yang *pertama*, kemunculan Agus beserta lembaganya (FMBB) tidak lepas dari campur tangan Bambang Soen (*non-governing elite*), dimana hal ini disebabkan oleh kekecewaannya terhadap pemerintahan yang ada. *Kedua*, adalah tentang lambatnya proses hukum dalam menyelesaikan kasus tersebut, akibat adanya intervensi kekuasaan. Kasus yang terjadi sejak tahun 2002 ini, baru bisa disidangkan pada tanggal 21 Desember 2004.

Dua poin tersebut di atas dapat dijadikan indikator untuk menilai demokratisasi di Bojonegoro. Jika mengacu pada adanya perluasan partisipasi politik dan perkembangan supremasi hukum secara umum, maka dapat dikatakan bahwa konflik tersebut memberikan dampak positif terhadap perkembangan demokrasi. Namun jika berpedoman pada asas netralitas serta kesetaraan di hadapan hukum, maka fenomena konflik terminal Rajekwesi belum begitu memberikan pengaruh positif terhadap demokratisasi di Bojonegoro. Terlepas dari itu semua, setidaknya kasus tersebut menjadi sebuah pendidikan politik bagi masyarakat Bojonegoro.

IV.2 Saran

Penerapan otonomi daerah sering kali memberikan pengertian yang berbeda-beda, sehingga pelaksanaannya seringkali memberikan kesan kerancuan yang semuanya dikembalikan lagi pada keberadaan Undang-Undang No.22 tahun 1999, sebagai Undang-Undang tentang otonomi daerah yang digunakan saat itu. Kerancuan itu dapat dilihat dari adanya anggapan bahwa tiap-tiap kota mempresentasikan dirinya sebagai kerajaan-kerajaan kecil yang bebas melakukan apa saja. Hal ini nampak pada keterangan beberapa responden dalam penelitian ini, dimana adanya kebijakan tentang pembangunan terminal Rajekwesi yang tidak melalui beberapa post-post yang ada dan lagi dalam pembangunan terminal tersebut – dari hasil investigasi Agus neserta lembaganya (FMBB) dan penyidikan yang dilakukan pihak kejaksaan negeri – rawan terjadi penyimpangan dalam bentuk KKN. Dilain sisi adanya kelompok-kelompok penekan tidak mampu merubah kebijakan yang telah ditetapkan, meskipun pada prinsipnya, tingkat partisipasi masyarakat Bojonegoro saat itu cukup tinggi, namun saluran-saluran partisipasi

masyarakat mengalami penyumbatan, hal ini yang dimaksud **Huntington** dengan pranata-pranata politik yang ada tidak bisa menampung dinamika yang terjadi di dalam masyarakat, dan jika hal ini tetap dibiarkan terjadi maka akan terjadi pembusukan politik (*Political decay*). Sehingga seharusnya struktur-struktur pemerintahan harus mampu mengakomodasi berbagai kepentingan yang ada di masyarakat.

